

ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MANADO

oleh:
Fidelius

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: fidel_trj@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Analisis rasio terhadap APBD dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio kemandirian kota Manado masih sangat rendah, rasio efektifitas cukup efektif. Pada rasio aktivitas pemerintah kota Manado memprioritaskan dananya pada belanja operasi. Rasio pengelolaan belanja sudah sangat baik karena melebihi 100% yang berarti mengalami surplus anggaran. PAD dan Pendapatan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, sedangkan rasio pertumbuhan belanja operasi masih sangat tinggi dibandingkan rasio pertumbuhan belanja modal. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah kota Manado berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik.

Kata kunci: analisis rasio, pengukuran kinerja, pengelolaan keuangan daerah, APBD.

ABSTRACT

One of the tools to analyze the performance of local governments in managing local finances is by analyzing the ratio of the APBD that has been implemented. Analysis of the ratio of the APBD is done to improve the quality of regional financial management. The purpose of this study was to determine the performance of the financial management area of the city of Manado. This type of research is a descriptive study using ratio analysis. The results showed that, the city of Manado independence ratio is still very low, the effectivity ratio is quite effective. On the activity ratio of Manado city government put more funds on operating expenses. Ratio of expenditure management has been very good since it exceeds 100%, which means running a budget surplus. Regional revenue and income growth every year, while the operating expenditure growth rate is still very high compared to the ratio of capital expenditure growth. Thus, the performance of the financial management area of the city of Manado by ratio analysis of financial is quite good.

Keywords : ratio analysis, performance measurement, regional financial management, APBD.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi (Mahsun, 2006:145).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007:230). Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Hal tersebut di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado berdasarkan analisis rasio kinerja keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengukuran Kinerja Keuangan

Bastian (2005:274) menyatakan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara

umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa yang akan datang.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2007: 330) mengungkapkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

PP No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Arti penting anggaran daerah dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini yaitu: anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan anggaran di perlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

Struktur laporan realisasi APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen-komponen laporan keuangan terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (4) Laporan Arus Kas, (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Analisis Rasio Keuangan

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2007:232). Beberapa analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2007:233).

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan

menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim 2007:234).

3. Rasio Aktivitas

Secara umum aktivitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi (rasio) belanja yang muncul dalam anggaran, baik untuk belanja rutin, maupun untuk belanja pembangunan (Gideon dan Hariadi 2007:5). Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

4. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki equitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya *surplus* dan *defisit* anggaran. *Surplus* atau *defisit* yaitu selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

5. Rasio Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2007:241).

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti/ Tahun | Judul | Tujuan | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----------------------|---|---|-------------------|--|---|---|
| Anastasia / 2012 | Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba | Menganalisis laporan keuangan Kab. Bulukumba dan mengetahui kinerja dalam mengelola keuangan daerah yang dinilai dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD | Deskriptif | Kinerja keuangan Kab. Bulukumba selama periode penelitian (2008-2010) kurang baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja. | Penelitian sebelumnya melakukan penelitian yang sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan pada APBD. | Perbedaannya adalah pada objek, periode penelitian, serta beberapa rasio keuangan yang digunakan. |
| Wahyuni / 2007 | Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang | Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat | Deskriptif | Berdasarkan hasil analisis, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. | Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan analisis rasio keuangan yang sama | Perbedaannya pada Objek Penelitian dan Periode Penelitian |

Sumber: Data Diolah, 2013

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang detail-detail spesifik dari sebuah situasi, lingkungan sosial atau hubungan. Fokus dari penelitian deskriptif lebih untuk menjawab bagaimana (*how*) dan siapa (*who*) (Sujoko, dkk. 2008 : 12).

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian untuk mendapatkan data mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Manado dengan alamat Jl. Balai Kota No. 1 Manado. Penelitian akan dilakukan pada bulan September 2013.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Manado tahun anggaran 2010, 2011, 2012.
2. Menghitung rasio kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio aktivitas, rasio pengelolaan belanja, rasio pertumbuhan.
3. Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan rasio kinerja pengelolaan keuangan masing-masing periode pada tahap sebelumnya.
4. Menarik kesimpulan atas rangkaian analisis rasio dan informasi yang disajikan, sehingga diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah: data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa gambaran umum Kota Manado dan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi APBD Kota Manado tahun anggaran 2010, 2011, 2012. Dilihat dari sumbernya maka pengumpulan data dapat menggunakan : sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2010:193). Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa catatan-catatan, laporan keuangan, dan berbagai publikasi yang terkait dengan masalah yang diangkat.

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah:

1. Tinjauan Kepustakaan (*library research*), yaitu teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelaahan pada teori-teori yang dipelajari lewat buku, literatur, dan jurnal untuk digunakan sebagai dasar teori yang melengkapi proses penyusunan skripsi ini.
2. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data yang akan diteliti berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado tahun anggaran 2010, 2011, 2012.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis rasio kinerja pengelolaan keuangan yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa Laporan Realisasi APBD, yang kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado adalah berupa Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2010, 2011, 2012. Laporan Realisasi APBD tersebut terdiri dari tiga bagian utama yaitu: pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pos-pos pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Hal-hal tersebut akan digunakan untuk menghitung rasio kinerja pengelolaan keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012

| Tahun | Total Pendapatan | Realisasi PAD | Rasio Kemandirian (%) |
|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 2010 | 672.960.863.401 | 90.828.482.199 | 13,50 |
| 2011 | 899.152.955.866 | 134.721.720.942 | 14,98 |
| 2012 | 1.037.498.574.726 | 178.307.223.102 | 17,19 |
| Jumlah | 2.609.612.393.993 | 403.857.426.243 | 45,67 |
| Rata-rata | 869.870.797.997,67 | 134.619.142.081 | 15,22 |

Sumber: BPK-BMD Kota Manado, 2013 (data diolah).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

2. Rasio Efektifitas

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektifitas Kota Manado Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012

| Tahun | Target PAD | Realisasi PAD | Rasio Efektifitas (%) |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 2010 | 126.312.677.538 | 90.828.483.199 | 70,91 |
| 2011 | 163.614.427.858 | 134.721.720.942 | 82,34 |
| 2012 | 171.028.198.384 | 178.307.223.102 | 104,26 |
| Rata-rata | | | 85,84 |

Sumber: BPK-BMD Kota Manado, 2013 (data diolah)

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

3. Rasio Aktivitas

Tabel 4. Perhitungan Rasio Aktivitas Kota Manado Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012

| Tahun | Belanja | | Total Pendapatan | Rasio Aktifitas Belanja (%) | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| | Operasi | Modal | | Operasi | Modal |
| 2010 | 580.947.622.851 | 97.490.453.342 | 672.960.863.401 | 86,33 | 14,49 |
| 2011 | 710.716.513.878 | 165.582.485.093 | 899.152.955.866 | 79,93 | 18,42 |
| 2012 | 767.255.675.173 | 162.297.276.287 | 1.037.498.574.726 | 73,95 | 15,64 |
| Rata-rata | | | | 80,07 | 16,18 |

Sumber: BPK-BMD Kota Manado, 2013 (data diolah)

Secara sederhana, rasio aktivitas (keserasian) itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2007:236):

$$1. \text{ Rasio belanja rutin (belanja operasional) terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100$$

$$2. \text{ Rasio belanja pembangunan (belanja modal) terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100$$

4. Rasio Pengelolaan Belanja

Tabel 5. Surplus/Defisit Anggaran dan Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Kota Manado Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012

| Tahun | Pendapatan | Belanja | Surplus/ Defisit | Rasio Pengelolaan Belanja |
|-----------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 2010 | 672.960.863.401 | 678.488.076.193 | -5.527.212.792 | 99,19 % |
| 2011 | 899.152.955.866 | 876.626.500.966 | 22.526.454.900 | 102,57 % |
| 2012 | 1.037.498.574.726 | 929.713.979.980 | 107.784.594.746 | 111,59 % |
| Rata-rata | | | | 104,55 % |

Sumber: BPK-BMD Kota Manado, 2013 (data diolah)

$$\text{Rasio pengelolaan belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

5. Rasio Pertumbuhan

Tabel 6. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Realisasi APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012

| Keterangan | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PAD | 90.828.483.199 | 134.721.720.942 | 178.307.223.102 |
| Rasio Pertumbuhan PAD | - | 48,33 % | 32,35 % |
| Total Pendapatan | 672.960.863.401 | 899.152.955.866 | 037.498.574.726 |
| Rasio Pertumbuhan Pendapatan | - | 33,61 % | 15,39 % |
| Belanja Operasi | 580.947.622.851 | 710.716.513.878 | 767.255.675.173 |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi | - | 22,34 % | 07,96 % |
| Belanja Modal | 97.490.453.342 | 165.582.485.093 | 162.297.276.287 |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Modal | - | 69,84 % | -01,98% |

Sumber: BPK-BMD Kota Manado, 2013 (data diolah)

Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan:

- Persentase pertumbuhan PAD $= \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p-1}{\text{PAD tahun } p-1} \times 100$
- Persentase pertumbuhan total pendapatan $= \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{Pendapatan tahun } p-1}{\text{Pendapatan tahun } p-1} \times 100$
- Persentase pertumbuhan belanja $= \frac{\text{Belanja tahun } p - \text{Belanja tahun } p-1}{\text{Belanja tahun } p-1} \times 100$
(Keterangan: p = tahun yang dihitung, $p-1$ = tahun sebelumnya)

Pembahasan

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Manado Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012

| Keterangan | Tahun Anggaran | | | Rata-rata |
|---------------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Rasio Kemandirian | 13,50 % | 14,98 % | 17,19 % | 15,22 % |
| Rasio Efektifitas | 70,91 % | 82,34 % | 104,26 % | 85,84 % |
| Rasio Aktivitas | | | | |
| - Belanja Operasi | 86,33 % | 79,93 % | 73,95 % | 80,07 % |
| - Belanja Modal | 14,49 % | 18,42 % | 15,64 % | 16,18 % |
| Rasio Pengelolaan Belanja | 99,19 % | 102,57 % | 111,59 % | 104,45 % |
| Rasio Pertumbuhan | | | | |
| - PAD | - | 48,33 % | 32,35 % | 40,34 % |
| - Pendapatan Daerah | - | 33,61 % | 15,39 % | 24,50 % |
| - Belanja Operasi | - | 22,34 % | 07,96 % | 15,15 % |
| - Belanja Modal | - | 69,84 % | -01,98 % | 33,93 % |

Sumber: Data Olahan, 2013.

Tabel 7 diatas rasio kemandirian keuangan Kota Manado selama tiga tahun anggaran rata-rata 15,22 % dapat dikategorikan rendah sekali (dibawah 25%). Ini berarti bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan pada APBD masih kecil dan juga berarti bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam APBD yang dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah atau instansi yang lebih tinggi, dana perimbangan serta lain-lain penerimaan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar dalam mencukupi kebutuhan belanja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Meskipun kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan rasio kemandirian Kota Manado dikategorikan rendah sekali tetapi perkembangan setiap tahunnya semakin meningkat yang bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mandiri dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.

Rasio efektifitas Kota Manado pada tabel diatas memperlihatkan peningkatan yang baik setiap tahunnya. Pada tahun 2010 rasio efektifitas PAD adalah sebesar 70,91% (kurang efektif), meningkat pada tahun 2011 menjadi 82,34 % (cukup efektif) dan pada tahun 2012 menjadi 104,26% (sangat efektif). Tahun 2012

dikategorikan sangat efektif karena rasio efektifitas melebihi 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kota Manado dianggap berhasil dalam meningkatkan realisasi pendapatan asli daerahnya sehingga melebihi target anggaran yang ditetapkan. Rata-rata rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kota Manado selama tiga tahun anggaran adalah 85,84% dapat dikatakan cukup efektif. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Manado dalam merealisasikan PAD-nya dari pajak, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pendapatan asli daerah dianggap sudah cukup baik jika dilihat dari rasio efektifitas.

Tabel 7, dapat kita lihat bahwa rasio aktivitas belanja Kota Manado, rata-rata rasio aktivitas belanja operasi (belanja rutin) sebesar 80,07% sedangkan rasio aktivitas belanja modal (belanja pembangunan) sebesar 16,18%. Rasio aktivitas belanja operasi Kota Manado sangat tinggi dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja modal. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Kota Manado lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Pemerintah daerah Kota Manado perlu menekan belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang yang terlalu besar guna dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini dianggap perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Kota Manado walaupun patokan untuk besarnya belanja operasi dan belanja modal terhadap APBD belum ada. Namun sebagai daerah yang berada di negara berkembang pemerintah daerah seharusnya meningkatkan belanja modal (pembangunan) dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Rasio pengelolaan belanja Kota Manado pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio pengelolaan belanja sebesar 104,45%. Pada tahun 2010 sebesar 99,19 % mengalami defisit anggaran. Pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2011 dan 2012 terjadi surplus anggaran dimana Kota Manado mengalami peningkatan rasio pengelolaan belanja melebihi 100% yaitu 102,57% dan 111,59%. Hal ini bisa disebabkan karena meningkatnya realisasi atas pendapatan kota Manado pada tahun tersebut.

Peningkatan pendapatan tersebut disertai dengan kemampuan pemerintah kota Manado dalam menekan realisasi atas belanja. Sehingga total belanja pemerintah Kota Manado lebih rendah bila dibandingkan dengan total pendapatan Kota Manado. Dengan demikian kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado baik jika dilihat berdasarkan rasio pengelolaan belanja.

Rasio pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan Kota Manado dari tahun 2010-2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Terutama rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan pada tahun 2011 sebesar 48,33% dan 33,61% menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 32,35% dan 15,39%. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Manado baik karena walaupun pertumbuhan PAD dan pendapatan tahun 2012 lebih rendah dari tahun 2011 tetapi setidaknya pemerintah mampu mempertahankan penerimaan PAD dan pendapatan tetap mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Pertumbuhan belanja Kota Manado yaitu belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif sedangkan pertumbuhan belanja modal pada tahun 2012 negatif atau tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini diakibatkan karena belanja modal pada tahun 2011 lebih besar dibandingkan dengan belanja modal tahun 2012. Jika kita melihat rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasi sebesar 15,15% dan belanja modal sebesar 33,93%, terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata rasio belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja operasi sehingga menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado cukup baik berdasarkan analisis rasio kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Manado berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah yang berarti bahwa kontribusi PAD masih sangat kecil dalam APBD serta campur tangan pemerintah pusat masih sangat dominan. Tetapi meskipun tergolong sangat rendah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti bahwa pemerintah Kota Manado telah berusaha untuk mandiri.
2. Berdasarkan analisis rasio efektifitas kinerja pengelolaan keuangan Kota Manado sudah cukup efektif. Dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2012 dikategorikan sangat efektif karena

melebihi 100% yaitu 104,26%. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD sehingga mampu melewati target anggaran yang ditetapkan.

3. Dari hasil analisis rasio aktivitas pemerintah daerah Kota Manado lebih memprioritaskan dananya pada belanja operasi (belanja rutin) untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan rasio aktivitas belanja modal (belanja pembangunan) dalam menyediakan sarana prasarana ekonomi untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan publik masih sangat kecil.
4. Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Manado sudah sangat baik dilihat dari rasio pengelolaan belanja yang rata-ratanya melebihi 100% yaitu 104,45%. Artinya bahwa pendapatan Kota Manado mampu melebihi belanja yang mengakibatkan adanya surplus anggaran.
5. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Manado dilihat dari rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan sudah cukup baik dimana mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini berarti bahwa dari tahun ke tahun PAD dan pendapatan mengalami pertumbuhan walaupun jumlah rasionya menurun. Pertumbuhan belanja operasi juga mengalami penurunan rasio setiap tahunnya tapi masih tetap positif sedangkan belanja modal pada tahun 2012 tidak mengalami pertumbuhan dimana nilainya negatif pada tahun anggaran 2012.

Saran

Memperhatikan hasil dan pembahasan terhadap rasio kinerja keuangan terhadap APBD Kota Manado serta kesimpulan, maka saran yang disampaikan kepada pemerintah daerah Kota Manado antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Manado harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan menggali sumber-sumber potensial baru dan mengoptimalkan yang sudah ada serta meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/propinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Pemerintah Kota Manado sebaiknya mulai mengurangi prioritas pengeluarannya untuk belanja operasi (rutin) dan memfokuskan pengeluaran untuk belanja modal (pembangunan) yang manfaatnya dapat dirasakan untuk kepentingan umum selain itu untuk menambah belanja pembangunan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan para insvestor sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Melisa. 2012. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1616>. Diakses Tanggal: 27 Agustus 2013. Hal:67.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Gideon., Hariadi. 2007, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*. (Tidak Publikasi) Pascasarjana UPNV Jatim. Surabaya.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahsun, Muhamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Sujoko, E., Hadi, D., Tan, Y. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Wahyuni, Nanik. 2007. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal El-Muhasaba Vol. 1 No. 1;01-2010*. UIN Maliki. Malang.
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/1879>. Diakses Tanggal: 22 Agustus 2013. Hal:15.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.